

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Ekonomi

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi telah menjadi titik pusat perhatian para ekonom. Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan beberapa negara berkembang banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Beberapa pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan, khususnya pada negara berkembang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan merupakan faktor penyebab luasnya cakupan yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan. Beberapa bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan ialah masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, masalah pembentukan modal, masalah pengerahan tabungan, serta permasalahan bantuan luar negeri.⁹

Kajian tentang kemiskinan dan cara mengenyahkannya tak dapat hanya dipolakan pada negara kaya. Karena di negara kaya ada suatu tendensi untuk menganggap pembangunan ekonomi sebagai takdir, sesuatu yang harus berkembang sendiri, dan tendensi untuk memusatkan perhatian pada gelombang perekonomian jangka pendek.¹⁰

⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999), hlm. 13.

¹⁰ M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.6

Todaro mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, (2) meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sehingga dengan ini, dapat dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi berarti.¹¹

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang
3. Perbaikan sistem kelembagaan pada seluruh bidang, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, serta budaya.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bukanlah dua istilah yang memiliki makna atau arti yang jauh berbeda. Hanya saja dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk, pemerataan pendapatan, ataupun perubahan struktur perekonomian. Sementara pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus; usaha menaikkan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang; serta perbaikan sistem kelembagaan pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.¹³

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya sektor jasa dan bertambahnya produksi barang modal. Professor W. W. Rostow menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:¹⁴

1. Masyarakat Tradisional

Dalam masyarakat tradisional ini terdapat banyak tanah yang dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan nyata. Namun pada kenyataannya, keinginan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis terbelenggu pada suatu batas (pagu), yaitu tingkat *output* per kapita yang dapat dicapai.

Hubungan darah dan kekeluargaan memegang peran yang sangat dominan dalam struktur sosial masyarakatnya. Kekuasaan politiknya berada di pusat, yaitu bangsawan yang bertanah, dan didukung dengan sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Pertanian merupakan sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan, dengan total 75%

¹³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15

¹⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, hlm. 47-54

penduduk sibuk di bidang tersebut. Kemudian pendapatannya dialokasikan pada pembangunan candi atau monumen, pesta penguburan dan perkawinan, serta digunakan untuk perang.

2. Pra-syarat Untuk Tinggal Landas

Pada masa ini menempatkan penalaran (*reasoning*) dan ketidakpercayaan (*skepticism*) sebagai pengganti kepercayaan (*faith*) dan kewenangan (*authority*), yang mengakhiri feodalisme dan membangkitkan negara kebangsaan, memicu semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan baru, pembaharuan, dan munculnya kaum borjuis (kaum elit) di kota dagang yang baru. Beralihnya masyarakat tradisional ke masyarakat pra-syarat tinggal landas bermula dari berkembangnya gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah suatu yang mustahil, dan merupakan suatu syarat atas suatu tujuan yang dianggap baik, baik untuk kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, maupun kehidupan di masa yang akan datang.

3. Tinggal Landas

Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang berhubungan langsung dengan perubahan radikal dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat dapat menciptakan konsekuensi yang menentukan. Periode tinggal landas ini dinilai tidak memakan waktu lama, yaitu sekitar dua dasawarsa, dimana perubahan ini distimulus oleh dorongan yang kuat, misalnya saja perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang dapat membawa perubahan

mendasar dalam proses produksi ataupun kenaikan proporsi investasi. Terdapat tiga kondisi penting yang menjadi persyaratan tahap tinggal landas, yaitu:

- a. Kenaikan laju investasi produktif, misalnya dari 5% atau kurang menjadi 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional netto
- b. Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi
- c. Munculnya kerangka politik, sosial, dan organisasi secara cepat, yang dapat menampung hasrat ekspansi di sektor modern, sehingga dapat memberikan daya dorong pada pertumbuhan.

4. Dewasa (*Maturity*)

Tahap dewasa ini merupakan tahap dimana masyarakat telah menerapkan sederet teknologi modern terhadap seluruh sumber daya secara efektif. Berbeda dengan tahap sebelumnya, tahap pendewasaan ini sedikit memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar empat dasawarsa. Ketika suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, maka terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu (1) berubahnya sifat tenaga kerja secara terdidik. Upah nyata mulai meningkat, dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Lebih dari itu, mereka akan lebih suka tinggal di kota daripada di desa. (2) berubahnya watak para pengusaha menjadi manajer yang halus dan sopan, serta (3) masyarakat merasa bosan dengan

keajaiban industri, sehingga mereka menginginkan perubahan yang lebih baik.

5. Masa Konsumsi Massal

Pada masa ini ditandai dengan adanya migrasi secara besar-besaran ke pinggiran kota, penggunaan mobil yang semakin meluas, tersedianya barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang dapat tahan lama. Di era ini perhatian masyarakat mulai bergeser, yang awalnya dari penawaran ke permintaan, dari produksi ke konsumsi. Namun, terdapat tiga kekuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada tahap ini, yaitu:

- a. Penerapan kebijakan nasional dalam meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional.
- b. Munculnya keinginan untuk memiliki satu negara sejahtera dengan meratanya pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, serta fasilitas hiburan bagi para pekerja.
- c. Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting lainnya, seperti mobil, rumah, serta berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Kecenderungan melakukan konsumsi secara massal, peniadaan pengangguran, serta peningkatan kesadaran jaminan sosial akan membawa pada pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyelidikan yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Terdapat banyak tokoh beserta pemikiran atau teori mereka mengenai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut:¹⁵

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ahli ekonomi klasik, seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi. Akan tetapi, dalam teori klasik ini, para ahli ekonomi menempatkan pertambahan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki pandangan bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti di sini pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus-menerus.

2. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa seorang pengusaha memegang peranan penting dalam hal pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dinilai sebagai golongan yang secara terus-menerus akan melakukan pembaharuan dan inovasi dalam kegiatan ekonomi yang akan menciptakan investasi baru, meliputi barang-barang baru, meningkatkan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas

¹⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, . . . hlm. 433-437.

pangsa pasar, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, serta pengadaan perubahan-perubahan dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan. Berangkat dari pendapatnya tersebut, Schumpeter memberikan gambaran peran pentingnya para pengusaha bagi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha yang memiliki keinginan atas pengadaan pembaharuan akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Dan investasi yang baru akan meningkatkan kegiatan perekonomian.

3. Teori Harrod-Domar

Teori ini melihat pertumbuhan dari sisi permintaan. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berlaku ketika pengeluaran agregat, melalui kenaikan investasi bertambah secara kontinu pada tingkat pertumbuhan yang telah ditentukan. Harrod-Domar memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa syarat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, yaitu (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal-produksi nilainya tetap, dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor. Analisis mereka menunjukkan bahwa meskipun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal telah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun periode selanjutnya. Atau dengan kata lain, investasi yang ada pada tahun

tersebut akan menambah kapasitas barang modal pada tahun atau periode berikutnya.

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik, teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Mereka menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, dan faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi menurut Solow ialah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh penambahan modal dan penambahan tenaga kerja.

Kinerja perekonomian suatu negara dalam periode tertentu dapat diukur melalui satu indikator penting, yaitu pendapatan nasional. Dengan mengetahui besarnya pendapatan pada suatu periode tertentu, maka dapat dilihat apakah perekonomian negara tersebut mengalami pertumbuhan ataupun kelesuan. Pendapatan perkapita merupakan Gross Domestic Product atau Gross National Product atau National Income yang dibagi dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi GDP per kapita, maka kemakmuran rakyatnya pun juga semakin baik. Besar atau kecilnya pendapatan suatu negara dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku ataupun berdasarkan atas dasar harga

konstan. Produk Domestik Bruto (PDB) ialah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam kurun waktu tertentu.¹⁶

PDB atas dasar harga berlaku, yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi mendeskripsikan nilai barang dan jasa akhir yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara PDB atas dasar harga konstan ialah nilai barang dan jasa akhir yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.¹⁷ Dalam GDP/PDB suatu negara, maka yang perlu diperhatikan ialah nilai dari barang jadi atau jasa akhir. Barang jadi atau jasa akhir ialah barang-barang yang tidak lagi dijadikan input oleh perusahaan lain, akan tetapi diproduksi dan dijual untuk dikonsumsi, investasi, dan ekspor.¹⁸ Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung nilai GDP, yaitu:

1. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi suatu negara pada periode tertentu, sebagaimana berikut:¹⁹

$$GDP = C + I + G + (X-M)$$

¹⁶ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm.25

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35-37

Dimana,

C = pengeluaran (konsumsi) rumah tangga untuk barang konsumen

I = pengeluaran perusahaan (investasi) untuk modal baru dalam bentuk persediaan, peralatan, dan pabrik

G = pengeluaran dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah

X-M = pengeluaran netto oleh luar negeri, ekspor dikurangi impor

2. Pendekatan Pendapatan

Berdasarkan pendekatan ini, GDP ialah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksudkan di sini ialah gaji/upah, sewa tanah, laba, bunga modal dan keuntungan, yang semua tersebut belum dipotong dengan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini, PDB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi), dengan model matematis berikut:

$$GDP = s/w + r + I + p$$

Menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan, dalam hal ini yang dimasukkan ialah sisi yang menerima GDP tersebut sebagai pendapatan, dan bukan yang membeli. Terdapat empat komponen yang harus diperhatikan, yaitu pendapatan nasional, depresiasi, pajak tidak langsung kurang subsidi, dan pembayaran faktor bersih (neto) kepada luar negeri. Pendapatan nasional ialah

pendapatan total yang diterima oleh warga negara dari negara pemilik faktor-faktor produksi, yang meliputi gaji/upah, bunga, laba, dan sewa. Sementara depresiasi ialah penyusutan/penurunan nilai atas suatu barang. Ketika menghitung penjualan akhir pada sisi pengeluaran, pajak tidak langsung seperti pajak penjualan, bea cukai, dan semacamnya harus diperhatikan pada sisi pendapatan.²⁰

Subsidi ialah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa imbalan barang dan jasa. GDP dapat diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan nasional dengan subsidi. Misalnya saja ketika memberikan subsidi kepada para nelayan, maka pembayaran tersebut merupakan pendapatan bagi para nelayan, sehinggatermasuk bagian dari GDP. Agar sisi pendapatan dan pengeluaran seimbang, maka subsidi harus dikurangi dengan sisi pendapatan. Kemudian pembayaran faktor neto untuk luar negeri ialah selisih antara penerimaan pendapatan faktor produksi dariluar negeri dengan pembayaran terhadap faktor produksi kepada luar negeri.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

²¹ *Ibid.*, hlm. 44-45

3. Pendekatan Produksi

Gross Domestic Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang ada di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa khir yang dihasilkan oleh berbagai unit-unit ekonomi, yang telah dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) berikut:

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- b. Pertambangan dan penggalian
- c. Industri pengolahan
- d. Listrik, gas, dan air bersih
- e. Bangunan
- f. Perdagangan, hotel, dan restoran
- g. Pengangkutan dan komunikasi
- h. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa.

C. Investasi (Penanaman Modal)

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi

modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaliran iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no.11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik

modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain :

- a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b) Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.

Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, di antaranya:²²

1. Untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan. Seseorang yang bijaksana akan berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya, sehingga tidak berkurang di masa mendatang, atau untuk meningkatkan taraf hidupnya di masa depan.
2. Untuk mengurangi tekanan inflasi. Risiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik dapat diminimalisir atau dihindari dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain.
3. Adanya dorongan untuk menghemat pajak. Sebagian negara melakukan kebijakan yang dapat mendorong sadar investasi pada

²² Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 8-9

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang berinvestasi pada bidang usaha tertentu.

Terdapat beberapa pembagian investasi. Berikut merupakan pembagian investasi berdasarkan jenisnya:²³

1. Investasi langsung (*direct investment*)

Yaitu investasi pada asset atau faktor produksi untuk melakukan usaha/bisnis, misalnya saja investasi pada perkebunan, perikanan, pabrik, toko, serta jenis usaha lainnya. Investasi ini sering pula disebut sebagai investasi riil atau investasi yang jelas wujudnya, mudah dilihat dan diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi langsung ini memberikan dampak ke belakang berupa input usaha maupun dampak ke depan berupa output usaha yang merupakan input bagi usaha lain.

2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Yaitu investasi bukan pada asset atau faktor produksi, melainkan pada asset keuangan (*financial assets*), seperti deposito, investasi pada surat berharga (sekuritas) seperti saham dan obligasi, CP (*commercial paper*), reksadana, dan sebagainya. Manfaat masa depan atas investasi jenis ini dapat berupa deviden atau capital gain. Kegiatan investasi tidak langsung ini dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang memiliki kelebihan dana, dan bisa menginvestasikannya

²³ *Ibid*, hlm. 10-11.

melalui lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang.

Pada dasarnya investasi baik langsung maupun tidak langsung saling melengkapi, akan tetapi pada hakikatnya, investasi tidak langsung merupakan derivatif atau turunan dari investasi langsung. Secara mikro (individu), investasi sektor riil dan sektor finansial merupakan alternatif investasi. Akan tetapi secara makro (nasional) tidak demikian. Investasi pada sektor riil merupakan investasi yang utama, dan investasi pada sektor finansial merupakan investasi penunjang, sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud secara keseluruhan.

Sementara investasi berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi:²⁴

1. Investasi publik (*public investment*)

Yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dalam rangka membangun prasarana dan sarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi ini bersifat nirlaba atau non profit motif, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, pasar, sekolah, jembatan, serta lainnya. Selain dilakukan oleh negara, investasi publik ini juga dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, seperti yayasan pendidikan, agama, keterampilan, kesenian, budaya, pelestarian lingkungan, dan olahraga.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12-22.

2. Investasi swasta (*private investment*)

yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan memperoleh laba (profit motif). Investasi ini dapat berupa investasi langsung (*direct investment*), seperti pembangunan berbagai usaha (bisnis) yang mampu menghasilkan barang ataupun jasa guna memperoleh laba maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*), seperti mendirikan lembaga keuangan guna menghimpun dana untuk disalurkan pada sektor riil. Sebagaimana investasi publik, investasi swasta ini juga dapat menghasilkan *value added* (nilai tambah) berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kerjasama investasi pemerintah dengan swasta (*public-private investment*)

Yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta yang berinvestasi dalam membangun sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, dan sarana publik yang lain. Bentuk penyertaan modal antara pemerintah dan swasta tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dari asset negara atau daerah, seperti tanah, bangunan, maupun asset lain bagi kepentingan publik. Hal ini dapat dideskripsikan dengan keadaan berikut, bahwa karena keterbatasan dana dari pemerintah daerah, terdapat banyak lahan kosong yang tidak

dimanfaatkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, lahan tersebut sangat potensial untuk menambah pendapatan. Oleh sebab itu, swasta (pihak kedua) diikutsertakan dalam pengembangan asset daerah. Dalam rangka melindungi kepentingan pemerintah daerah untuk menerima bangunan dan fasilitas dalam kondisi yang baik dan masih memiliki nilai komersial, maka selama masa pengelolaan, pihak swasta diwajibkan untuk memelihara dengan mengasuransikan asset tersebut.

4. Investasi kerja sama antarnegara (*state partnership investment*)

Kerjasama semacam ini dapat ditemui dalam lingkup ASEAN, seperti pupuk ASEAN. Kerja sama ini terbentuk dengan alasan meningkatkan kerja sama antarnegara dalam memenuhi kebutuhan kawasan (regional), meningkatkan aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai tambah kawasan tersebut, memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik pada kawasan tersebut, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya regional.

Dalam mempercepat pembangunan ekonomi, maka investasi asing negara dinilai lebih penting jika dibandingkan dengan investasi asing swasta. Kebutuhan keuangan dari negara terbelakang dinilai begitu besar, sementara investasi asing swasta hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil saja. Akan tetapi, terdapat kesadaran bahwa kemiskinan pada suatu tempat merupakan hal yang berbahaya bagi kemakmuran di tempat lain. Sehingga dengan hal tersebut, negara-negara maju merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu negara lain yang masih kekurangan.

Namun, kesadaran itu pun tidak pernah dilakukan secara tulus. Mereka selalu didorong oleh kebijaksanaan internasional dalam suasana perang dingin, dengan jalan memberikan beberapa syarat dalam bantuan yang diberikan kepada para penerima bantuan.²⁵ Dalam kaitannya dengan pembangunan suatu negara, investasi asing langsung dinilai memiliki keuntungan lebih jika dibandingkan dengan investasi secara tidak langsung, seperti:

1. Investasi langsung memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi, dan organisasi yang mutakhir pada negara yang dituju.
2. Investasi langsung memiliki keuntungan tambahan melebihi investasi portofolio, dalam hal negara yang dituju memperoleh jumlah modal yang lebih besar. Sebagian laba dari investasi langsung pada umumnya ditanamkan kembali ke dalam pengembangan, modernisasi, ataupun pada pembangunan yang terkait.
3. Kemungkinan pelarian modal dari negara peminjam kurang, sehingga dimungkinkan beban neraca pembayaran menjadi kecil selama depresi karena investasi langsung, tidak seperti obligasi, dibayar dengan deviden yang dikaitkan dengan laba.
4. Pada tahap awal pembangunan, investasi asing langsung juga meringankan beban neraca pembayaran negara berkembang karena tenggang waktu pengoperasian dan perolehan laba akan sedikit lebih lama.

²⁵ M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, . . . hlm. 503.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Pengertian

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.²⁶

Pihak swasta yang memiliki Modal Dalam Negeri tersebut, dapat secara perseorangan dan atau merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan kekayaan seperti tersebut diatas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal.²⁷

Untuk mengetahui dan membedakan apakah suatu perusahaan itu merupakan suatu perusahaan asing atukah perusahaan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan modalnya.

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang apabila sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang di tanam

²⁶ Rai wijaya, *penanaman modal: pedoman prosedur mendirikan dan menjalankan perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN*, (Jakarta: Pradnya Paramita,2005),hlm.23

²⁷ *Ibid.*,hlm.23

di dalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Dan bila dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka sekurang-kurangnya persentase 51% dari umlah sahamnya harus saham atas nama. Berdasarkan ketentuan berlaku, persentase itu harus selalu ditingkatkan sehingga menjadi sebesar 74% pada tanggal 1 Januari 1974, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah termasuk perusahaan asing.²⁸

b. Bidang usaha

Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu di pelopori atau dirintis oleh pemerintah. Bidang usaha negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah.²⁹

c. Tenaga Kerja

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya di tanam. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Dalam hal demikian dapat digunakan tenaga ahli warga negara asing dan berdasarkan ketentuan pemerintah.

²⁸ *Ibid.*, hlm.23

²⁹ *Ibid.*, hlm.23-24

Penggunaan tenaga kerja warga negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila di pandang perlu oleh pemerintah.³⁰

3. Pandangan Islam Tentang Kegiatan Investasi

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*).³¹ Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

a. Pengertian investasi dalam islam

Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

³⁰ *Ibid.*, hlm.24-25

³¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung; Alfabeta, 2010), hlm.,14

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti parainvestor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu- ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:

1) QS. Al-Hasyr : 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang -orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis

³² Departemen agama RI, *Al quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.548

kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2) QS. Lukman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ^ط
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³³

Ayat diatas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.

³³ *Ibid.*, hlm.414

Al-Qur'an mengartikan ayat di atas "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.³⁴ Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.

3) QS. Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³⁴ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm., 11.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁵

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.³⁶

Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal -hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia – akhirat.

b. Etika Investor dalam Berinvestasi Dalam Islam

Menurut Syafi'i Antonio,³⁷ ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan

³⁵ Departemen agama RI, *Al quran dan terjemahnya*,.....hlm.44

³⁶ *Ibid*, hlm. 13 - 17

³⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm., 59

dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembali) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap.

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi di atas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembali (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (Mudarib). Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembali (return of investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana,³⁸ tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik tiba, zulm, maysir & gharar.

³⁸ *Ibid.*, hlm.60

Agar terhindar dari praktik investasi,¹¹ yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu:³⁹

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*).
5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang

³⁹ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.191.

terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider trading*.⁴⁰ Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falah* (sejahtera lahir-batin) di dunia juga diakhirat.

c. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam.⁴¹ Dengan menyadari perbedaan *Fiqiyah* yang ada dan belajar dari praktik negara lain, maka disini akan dibahas jenis dan instrument investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi.⁴²

Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasar UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.17

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm., 140.

⁴² *Ibid.*, hlm.140

instrument saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden dan didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (*bai' ad-dayn*) dengan segala kontroversinya.

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam seperti usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu, dengan mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syaria'ah masih terbatas, seluruh imiten dapat dapat memiliki pendapatan dari penempatan dananya di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga. Oleh karena itu, pemilihan emiten yang benar-benar terdapat dari

pendapatan tersebut sangat sulit.⁴³ Situasi ini dianggap sebagai suatu kondisi darurat yang sifatnya sementara sampai ada sistem perekonomian yang telah memasukkan nilai ajaran Islam. Demikian juga apabila emiten merupakan perusahaan induk, harus dipertimbangkan juga jenis kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

Jenis kegiatan emiten yang dianggap tidak layak di investasikan ialah ; apabila tingkat pencapaian bunga bersih beserta pendapatan non halal, baik dari emiten maupun anak-anak perusahaannya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya diatas 15%. Begitu pula, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50 % di perusahaan yang usahanya bertentangan dengan syariah Islam, maka jenis kegiatan emiten seperti ini juga dianggap bertentangan dengan syariah Islam.

Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenis-jenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyaath*) serta tidak boleh melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, termasuk tindakan melakukan penawaran palsu (*najsy*), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*), menyebarkan informasi

⁴³ *Ibid.*, hlm.141

yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*), melakukan penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.

Nisbah utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur pembiayaan suatu emiten. Apakah emiten tersebut sangat bergantung dengan pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Nisbah utang terhadap modal merupakan perbandingan antara utang terhadap total nilai modal termasuk cadangan, laba ditahan, dan utang dari pemegang saham.⁴⁴

Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 81% (utang 45%, modal 55%), maka emiten tersebut dapat dianggap bertentangan dengan syariah Islam. Nisbah yang diizinkan (diperbolehkan) akan ditentukan perkembangannya setiap waktu oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).⁴⁵

Selain itu, dalam melakukan penempatan investasi pada suatu perusahaan, harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip yang islami, maka resiko atas

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.141

⁴⁵ *Ibid*

investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebihi batas yang wajar.⁴⁶

Pada akhirnya hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal (investor). Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur tidak halal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur tidak halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).⁴⁷

Jadi jelas bahwa dalam berinvestasi umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu, para pemilik modal harus mengetahui investasi yang diperolehkan oleh syariah Islam.

D. Utang Luar Negeri (ULN)

Pinjaman atau utang luar negeri ialah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.⁴⁸ Terdapat pembagian atas bantuan/pinjaman luar negeri menurut Waning Amir, yaitu:

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.142

⁴⁸ Soeradi, *Implementasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagai Dana Pembangunan*, . . . hlm. 13.

1. Menurut Sumber

a. Non Komersial

1) Consultative Group on Indonesia (CGI), dimana anggotanya terdiri dari Jepang, Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jerman, Canada, Italia, Swiss, Inggris, Selandia Baru, Austria, Spanyol, dan sebagainya. Bantuan/pinjaman luar negeri, baik yang termasuk dalam pinjaman atau hibah yang berasal dari CGI dibedakan menjadi:

- a) Bantuan bilateral, yaitu pinjaman/bantuan yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga/badan keuangan yang dibentuk oleh negara yang bersangkutan untuk mengelola atau melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau pinjaman kepada negara penerima, seperti kepada Indonesia oleh anggota CGI, misalnya Overseas Economic Cooperation Fund Jepang, Kreditanstalt für Wiederaufbau Jerman, United State Agency for International Development
- b) Bantuan multilateral, yaitu bantuan atau pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga/badan keuangan internasional/regional, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya, seperti IBRD, IDA, IMF, ADB, UNDP, dan IFAD.

2) Bantuan Non CGI

Bantuan ini bersumber dari negara atau lembaga/badan internasional dan regional yang bukan anggota CGI, yang terbagi ke dalam:

- a) Pinjaman bilateral, yaitu bantuan yang berasal dari pemerintahan suatu negara, yang disalurkan melalui suatu badan yang dibentuk oleh negara pemberi bantuan/pinjaman, seperti SFD (Saudi Fund for Development), KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic Development, dan BIA (The Brunei Investment Agency).
- b) Pinjaman multilateral, yaitu pinjaman/bantuan yang berasal dari lembaga/badan keuangan Internasional, dimana Indonesia termasuk dalam anggotanya, seperti IDB (Islamic Development Bank).
- c) Bantuan/pinjaman lainnya, yaitu bantuan yang berasal dari selain kelompok CGI dan non CGI
- d) Kredit Ekspor, yaitu pinjaman yang berasal dari suatu negara untuk mendorong kegiatan ekspor negaranya yang sekaligus membantu keperluan biaya pembangunan dari negara yang bersangkutan.

b. Pinjaman Komersial

1) Obligasi

Obligasi ialah pinjaman dengan penerbitan obligasi di luar negeri, misalnya saja securities dan emisi, dengan tingkat bunga tetap, yang pembayaran bunganya dilakukan secara teratur, dan pembayaran kembali pokok hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Dua obligasi yang diterbitkan di sini, yaitu:

- a) *Public Issues* (obligasi umum), dimana pelaksanaannya melalui sindikat bank-bank sebagai penjamin, yang kemudian juga mendaftarkan/menjual obligasi tersebut di pasar bursa.
- b) *Private placement*, yaitu penerbitan obligasi secara terbatas dan tidak diumumkan kepada publik, yang penjualannya dilakukan oleh emiten (*issuer*) kepada sejumlah bank atau investor di bidang asuransi dan pensiun, yang disertai bantuan dari sejumlah penjamin (*underwriter*) yang terbatas. Tujuan dari penerbitan obligasi ini ialah memperluas sumber-sumber bantuan luar negeri.

2) Leasing

Leasing atau sewa beli atau juga disebut *instalment sale financing* ialah kegiatan yang meminjam uang dari lembaga *leasing* luar negeri dalam rangka pengadaan barang dari suatu supplier, dimana barangnya dapat berasal dari lembaga *leasing*

yang bersangkutan. Apabila kita memiliki kontrak pengadaan barang dari departemen teknis atau proyek-proyek, maka kita dapat memanfaatkan *leasing* ini, dimana persyaratannya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan kredit ekspor. Departemen teknis melakukan penandatanganan suatu *supplier*, yang kemudian kontrak ini digadaikan kepada pihak *leasing*

- 3) SAF, yaitu penerbitan surat hutang, yang merupakan pinjaman yang berasal dari suatu lembaga keuangan luar negeri, dimana pinjaman tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
- 4) Cash loan, yaitu suatu pinjaman yang diterima dari sindikat bank-bank internasional dalam bentuk uang tunai valuta asing guna membiayai proyek serta pembiayaan lain yang diperlukan.
- 5) Floating rate note, yang tidak jauh berbeda dengan obligasi, hanya saja tingkat bunga yang mengambang sesuai dengan perkembangan bunga pada pasar modal internasional, seperti London Inter Bank Offer Rate (LIBOR) dan Singapura Inter Bank Offer Rate (SIBOR).

2. Menurut Jenis

- a. Bantuan Progam, ialah bantuan luar negeri devisa kredit, bantuan pangan dan non pangan, dimana bantuan ini disebut sebagai bantuan pembangunan yang selain digunakan untuk menghasilkan dana rupiah dalam menutup kekurangan bahan pangan dalam negeri, juga

digunakan untuk membiayai proyek-proyek sektoral dan regional. Di antara bantuan program tersebut ialah:

- 1) Bantuan pangan dalam rangka PL-480 (*Public Law 480*) dari USA berupa beras, tepung terigu, bulgur, dan gandum
 - 2) Bantuan non pangan, seperti kapas, benang tenun, dan tembakau
 - 3) Bantuan berupa devisa atau valuta asing.
- b. Bantuan proyek, yang biasanya disebut sebagai penerimaan pembangunan, ialah bantuan yang menjadi penerimaan negara untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dalam bantuan ini termasuk juga di dalamnya ialah bantuan teknik, yaitu bantuan berupa tenaga ahli (*expert*) yang didatangkan dari luar negeri, dan atau pengiriman tenaga Indonesia ke luar negeri untuk (*fellowship, scholarship, seminar, kerja sama kebudayaan, dan semacamnya*). Berdasarkan persyaratannya, khususnya suku bunga, bantuan proyek ini dapat dibedakan menjadi pinjaman lunak (*soft loan*), pinjaman setengah lunak (*middle soft loan*), dan pinjaman keras (*hard loan*). Sementara apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 Pinjaman Luar Negeri (Pasal 5) menurut jenisnya terbagi menjadi pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Dan apabila dilihat dari sumbernya (Pasal 6) terbagi menjadi kredit multilateral, kredit bilateral, kredit swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor.

3. Menurut Sifat

a. Pinjaman

Yaitu setiap penerimaan negara, baik dalam devisa maupun dalam bentuk barang atau peralatan, atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari negara lain, lembaga keuangan internasional, ataupun badan internasional lainnya yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut di antaranya ialah bersifat lunak (*soft loan*) yang dapat dilihat dari jangka waktu kredit yang berkisar antara 25-50 tahun, dengan tingkat bunga antara 0%-3,5% per tahun, dengan *grace period* (masa tenggang) antara 10-15 tahun. Pada masa pinjaman sebelumberakhirnya *grace period*, hanya dilakukan pembayaran bunga dari pinjaman. Setelah *grace period* berlalu, maka pembayaran akan meliputi bunga dan cicilan pinjaman pokok. Sementara pinjaman yang bersifat setengah lunak bunganya berkisar antara 3,5%-7% per tahun. Kemudian pinjaman keras bunganya mencapai 7% atau lebih per tahun, di samping biaya yang lain seperti *commitment fee*, *out of pocket*, *annual fee*, dan sebagainya.

b. Hibah (*grant*)

Ialah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa, barang/peralatan, ataupun dalam bentuk jasa yang diterima dari dalam negeri atau negara asing, lembaga keuangan internasional, serta badan internasional lainnya yang tidak perlu untuk dibayar kembali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 2011 Pasal 42

Tanggal 12 Februari 2011, bentuk hibah yang diterima pemerintah RI ialah berupa uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang atau jasa, dan surat berharga.

4. Menurut Bentuk

- a. Berupa barang atau peralatan yang dapat berasal dari produk PPHLN, atau dari negara lain sesuai dengan ketentuan dalam NPLN yang bersangkutan
- b. Jasa, seperti konsultan asing ataupun expert asing
- c. Devisa, baik yang termasuk dalam valuta asing yang dirupiahkan, maupun rupiah pinjaman luar negeri (RPLN).

Terdapat beberapa maksud atau tujuan suatu negara menerima atau memberikan suatu pinjaman, sebagaimana berikut:⁴⁹

1. Motivasi Negara Memberi Pinjaman

Meskipun terdapat beberapa bantuan yang didorong oleh alasan-alasan moral dan kemanusiaan dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang, namun secara garis besar, motivasi negara maju dalam memberikan bantuannya ialah:

a. Motivasi Politik

Bantuan luar negeri harus dilihat sebagai tangan panjang kepentingan negara-negara pendonor (pemberi bantuan). Motivasinya pun juga berbeda untuk setiap negara, tergantung pada situasi nasional, yang bukan semata-mata

⁴⁹ Soeradi, *Implementasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagai Dana Pembangunan*, . . . hlm. 94-96.

dikaitkan dengan kebutuhan negara penerima yang secara potensial berbeda antara negara satu dengan yang lainnya.

b. Motivasi Politik

Kaitannya dengan prioritas strategi dan politik yang luas, program bantuan luar negeri dari negara-negara maju memiliki rasional ekonomi yang kuat. Meskipun motivasi politik menjadi alasan utama, namun landasan yang bersifat ekonomis dapat digunakan sebagai ‘pemanis bibir’ dalam membenarkan motivasi pemberian bantuan. Argumentasi ekonomi yang penting dan telah dikemukakan oleh pandangan yang mendukung bantuan luar negeri ialah:

- 1) Sumber daya keuangan luar negeri (pinjaman dan hibah) dapat memainkan peran yang masuk akal dalam melengkapi kelangkaan sumber daya dalam negeri guna mengejar target tabungan, investasi, dan devisa.
- 2) bantuan luar negeri diberikan oleh negara donor dalam rangka mempercepat proses pembangunan yang dapat menghasilkan tambahan tabungan dalam negeri sebagai akibat tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Secara bertahap, bantuan luar negeri juga akan berkurang
- 3) Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan bantuan teknik dalam bentuk *transfer of knowledge* kepada manpower untuk menjamin bahwa dana tersebut akan dipergunakan

secara efisien, sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Besarnya bantuan harus disesuaikan dengan kapasitas menyerap negara penerima bantuan, suatu euphemisme untuk menyatakan kemampuannya menggunakan bantuan luar negeri secara bijaksana dan produktif.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Syahrani, yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Utang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan pendekatan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini Secara simultan, PMDN, PMA, dan utang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai probabilitas F-statistik 0.000. Secara parsial, hasil regresi pada taraf nyata ($\alpha = 5\%$) PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 9.4625 dan probabilitas 0.0099. PMA juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 2.18 dan probabilitas 0.7753. Sedangkan utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 9.357007 dan probabilitas 0.0000.⁵⁰

Semua variabel bebas yang terdapat dalam penelitian Syahrani sama dengan seperti variabel bebas dalam penelitian yang penulis lakukan akan tetapi, tahun dilakukannya penelitian berbeda, dimana penelitian ini diambil

⁵⁰ Febriana Rizki Syahrani, *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1985-2009*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

pada tahun 2010-2016, sedangkan penelitian Syaharani mengambil tahun 1985-2009. Metode analisis yang digunakanpun berbeda, Syaharani menggunakan metode analisis dengan program komputer Eview 5.1, sedangkan penulis menggunakan metode regresi linier berganda dengan program SPSS 16.

Herdiana, yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan metode regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dalam jangka panjang, konsumsi dan kredit perbankan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, sementara investasi berpengaruh signifikan negative terhadap PDB Indonesia. Dalam jangka pendek, hanya konsumsi yang berpengaruh signifikan positif terhadap PDB, sementara investasi dan kredit perbankan tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia.⁵¹

Variabel ketiga dalam penelitian ini yaitu utang luar negeri tidak terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Herdiana, akan tetapi variabel pertama dan kedua yaitu yang investasi asing dan investasi dalam negeri terdapat pada penelitian Herdiana. Tahun dilakukannya penelitian inipun juga berbeda, yaitu Dyta melakukan penelitian pada tahun 1980-2010, sementara penulis melakukan penelitian pada tahun 2010-2016. Metode analisis yang digunakan juga berbeda, Dyta menggunakan metode Error Correction Model (ECM) sedangkan penulis menggunakan metode regresi linier berganda.

⁵¹ Dyta Herdiana, *Pengaruh Konsumsi, Investasi Dan Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1980-2010*, (Jakarta: IUN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.87

Sholikah, yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Investasi, Utang Luar Negeri, dan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan metode statistik. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari Adjusted R Square sebesar 0,987, yang secara statistik besarnya kontribusi investasi, utang luar negeri, dan kredit perbankan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 98,7%, dan sisanya, yaitu sebesar 1,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.⁵²

Variabel bebas kredit perbankan tidak terdapat dalam penelitian ini, akan tetapi variabel bebas investasi dan utang luar negeri terdapat dalam penelitian ini. Tahun dilakukannya penelitian ini juga berbeda, dimana Agustina Rahmawati mengambil tahun penelitian 2007-2014, sedangkan penulis menggunakan tahun penelitian 2010-2016. Metode analisis yang digunakan sama antara Sholikah dan penulis yaitu menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS 16.

Prasetyo, yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 1985-2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMDN, tenaga kerja, dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan PMA berpengaruh negatif

⁵² Agustina rahmawati sholikah, *pengaruh investasi, utang luar negeri dan kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2007-2014*, (IAIN Tulungagung:2015)

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji F pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai F-hitung sebesar 173,7557 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.⁵³

Terdapat dua variabel independen yang berbeda di antara penelitian ini yaitu variabel tenaga kerja dan ekspor yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Akan tetapi variabel penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terdapat dalam variabel bebas penulis. Tahun dilakukannya penelitian juga berbeda, yaitu Prasetyo pada tahun 1985-2009, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-2016. Metode yang digunakan juga berbeda, Prasetyo menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan program Eviews 6.0, sedangkan penulis menggunakan metode regresi linier berganda dengan program SPSS 16.

Mauludi, dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata utang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi didapat nilai R Square sebesar 0.76 hal ini menggambarkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu memberikan penjelasan mengenai variabel

⁵³ Eko prasetyo, Skripsi: *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Periode Tahun 1985-2009* (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2011)

dependen sebesar 76% adapun 24% lagi dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti ekspor–impor, kurs, dan PMDN.⁵⁴

Variabel bebas maupun variabel terikat yang di gunakan oleh Mauludi sama dengan variabel yang di gunakan oleh penulis. Yaitu sama-sama menggunakan variabel PMA, PMDN dan utang luar negeri sebagai variabel independennya dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai variabel dependennya. Akan tetapi tahun dilakukannya penelitian berbeda antara Mauludi dengan penulis, yaitu Mauludi pada tahun 1990-2011, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010-2016. Metode yang di gunakan sama yaitu regresi linier berganda dengan SPSS 16.

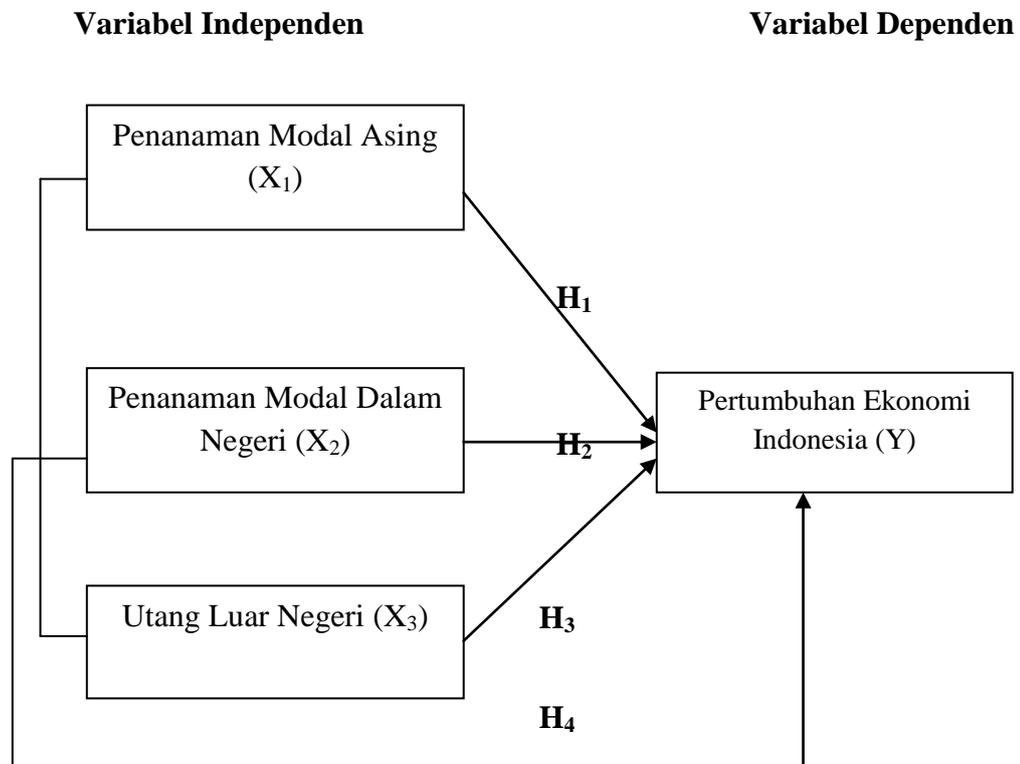
F. Kerangka Konseptual

Yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad iqbal al mauludi, *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1990-2011*, (Jakarta: skripsi tidak diterbitkan, 2013), hlm. 71

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan Ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 42.

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Dari kerangka konsep penelitian di atas, dapat dilihat ada empat variabel konsep, yaitu penanaman modal asing (X_1), penanaman modal dalam negeri (X_2), utang luar negeri (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y).

Penanaman modal baik itu penanaman modal asing (X_1) maupun penanaman modal dalam negeri (X_2) seharusnya bisa memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Y). Dalam ekonomi ada terminologi ” *there is no (economic) growth with out investment* ”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa investasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi, walaupun investasi bukan satu-satunya komponen pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi., investasi

mempunyai dua peran penting dalam makro ekonomi. *Pertama* pengaruhnya terhadap permintaan agregat, dan ini akan mendorong tingkat *out put* dan kesempatan kerja. Ini dampak atau peran jangka pendeknya. *Kedua* efeknya terhadap pembentukan kapital. Adanya investasi, akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan sebagainya. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi *out put*, dan mendorong pertumbuhan untuk secara terus menerus terjadi.⁵⁶

Utang luar negeri merupakan sarana menambah penerimaan Negara non pajak, yang di harapkan akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paham keynesian ditelaah oleh Eisner (1989) dan Bernheim (1989). Paham keynesian melihat kebijakan peningkatan anggaran belanja yang dibiayai oleh utang luar negeri akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi akibat naiknya permintaan agregat sebagai pengaruh lanjut dari terjadinya akumulasi modal. Kelompok keynesian memiliki pandangan bahwa defisit anggaran pemerintah yang ditutup dengan utang luar negeri akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sehingga kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi. Hal ini mengakibatkan beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, hal ini kemudian akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan. Peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian.⁵⁷

⁵⁶ Edy Suadi Hamid, *Ekonomi Indonesia dari Sentralisasi ke Desentralisasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 160-165

⁵⁷ Arif Lukman Rachmadi, *Analisis pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia*, (Malang: Jurnal Ilmiah, 2013), hlm.5

Jadi, kerangka konseptual di atas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya penelitian juga ingin mengetahui variabel independen manakah yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah jawaban sementara atas suatu rumusan masalah penelitian.⁵⁸ Rumusan hipotesis atas penelitian ini ialah:

1. H_1 : Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. H_2 : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. H_3 : Utang luar negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia
4. H_4 : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 159.